



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR **134** TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONOROGO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar

- dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan, Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan, Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.298.905.405.508,00 (*Dua Trilyun Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Empat Ratus Lima Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 305.359.655.300,00 (*Tiga Ratus Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 91.545.000.000,00 (*Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.099.540.000,00 (*Delapan Belas Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.094.064.300,00 (*Satu Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 194.621.051.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 91.545.000.000,00 (*Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - j. Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 905.000.000,00 (*Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah*);
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.435.000.000,00 (*Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 260.000.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*);

- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 27.100.000.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Juta Rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 165.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 430.000.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Rupiah*);
- (11) Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 17.600.000.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*)

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 905.000.000,00 (*Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak losmen;
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 850.000.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.000.000,00 (*Lima Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.435.000.000,00 (*Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak restoran dan sejenisnya;
 - b. Pajak warung dan sejenisnya;
 - c. Pajak jasa boga/Katering dan sejenisnya;
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 900.000.000,00 (*Sembilan Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Pajak warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Pajak jasa boga/Katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 260.000.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Tontonan Film;
 - b. Pajak Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;

- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Pajak Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 110.000.000,00, (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame papan/Billboard/videotron/megatron;
 - b. Pajak reklame kain;
- (2) Pajak Reklame papan/Billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00, (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 27.100.000.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan jalan sumber lain;
- (2) Pajak Penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.100.000.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak parkir;
- (2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 165.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak air tanah;
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 165.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 430.000.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Granit/Andesit;
- (2) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 430.000.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 17.600.000.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. BPHTB Pemindahan Hak;
- (2) Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.600.000.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 18.099.540.000,00 (*Delapan Belas Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi perizinan tertentu

- (2) Retribusi jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.406.840.000,00 (*Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.682.200.000,00 (*Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.010.500.000,00 (*Satu Milyar Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 9.406.840.000,00 (*Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman / dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penyediaan Dan /Atau Penyedotan Kakus;
 - i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

k. Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 170.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.450.000.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman / dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00 (*Empat Juta Rupiah*);
- (5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*);
- (6) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (*Empat Milyar Rupiah*);
- (7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*);
- (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*);
- (9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 63.640.000,00 (*Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- (10) Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 43.200.000,00 (*Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (11) Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 71.000.000,00 (*Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah*);

- (12) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,00 (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.682.200.000,00 (*Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- Retribusi Pemakaian kekayaan daerah;
 - Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;
 - Retribusi terminal;
 - Retribusi Tempat khusus parkir;
 - Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.694.000.000,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah*);
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.500.000,00 (*Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 31.500.000,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (5) Retribusi Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 306.200.000,00 (*Tiga Ratus Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);

- (6) Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.450.000.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (7) Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 190.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.010.500.000,00 (*Satu Milyar Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan bangunan;
 - b. Retribusi izin Trayek Untuk Menyediakan pelayanan Angkutan Umum;
- (2) Anggaran Retribusi Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).
- (3) Anggaran Retribusi izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.500.000,00 (*Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.094.064.300,00 (*Satu Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD;

- (2) Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.094.064.300,00 (*Satu Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran lain- lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 194.621.051.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - Jasa giro;
 - Pendapatan Bunga;
 - Pendapatan BLUD;
 - Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - Pendapatan denda atas Pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 383.125.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.010.000.000,00 (*Tiga Milyar Sepuluh Juta Rupiah*).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.489.476.000,00 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 181.268.400.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

- (6) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.170.000.000 (*Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Pendapatan denda atas Pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 300.050.000,00 (*Tiga Ratus Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.993.545.750.208,00 (*Satu Trilyun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.813.468.309.000,00 (*Satu Trilyun Delapan Ratus Tiga Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 180.077.441.208,00 (*Seratus Delapan Puluh Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.813.468.309.000,00 (*Satu Trilyun Delapan Ratus Tiga Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;

- b. Dana Insentif daerah;
 - c. Dana Desa;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.526.894.584.000,00 (*Satu Trilyun Lima Ratus Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*);
 - (3) Dana Insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.869.139.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
 - (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 258.704.586.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Lima Ratus Delapan puluh Enam Ribu Rupiah*);

Pasal 24

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.526.894.584.000,00 (*Satu Trilyun Lima Ratus Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum-Dana Bagi hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
- (2) Dana transfer umum-Dana Bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 111.245.445.000,00 (*Seratus Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 979.474.402.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua*

Ribu Rupiah).

- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 108.663.769.000,00 (*Seratus Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).*
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 327.510.968.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).*

Pasal 25

- (1) Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.869.139.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. DID
- (2) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.869.139.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).*

Pasal 26

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 258.704.586.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa

- (2) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 258.704.586.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 180.077.441.208,00 (*Seratus Delapan Puluh Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Pendapatan bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 129.053.799.933,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*);
- (3) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.023.641.275,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Pendapatan Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 129.053.799.933,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

- (2) Pendapatan bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 129.053.799.933,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.023.641.275,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
- (2) Pendapatan Bantuan Keuangan dari pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.023.641.275,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 30

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00. (*Nol Rupiah*).

Pasal 31

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.518.771.426.224,00 (*Dua Trilyun Lima Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.574.926.021.265,00 (*Satu Trilyun Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 980.939.747.566,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 513.502.386.683,00 (*Lima Ratus Tiga Belas Milyar Lima Ratus Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.498.083.516,00 (*Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 57.497.853.500,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.487.950.000,00 (*Empat Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 980.939.747.566,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - g. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 633.225.569.416,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah*).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.782.797.159,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan Berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 204.776.984.720,00 (*Dua Ratus Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.992.518.000,00 (*Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 682.649.065,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 993.120.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 72.486.109.206,00 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 633.225.569.416,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;

- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 482.527.198.490,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.206.285.926,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.999.006.000,00 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.874.872.000,00 (*Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.360.447.000,00 (*Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 25.906.512.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.041.782.000,00 (*Satu Milyar Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 24.163.000,00 (*Dua Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 26.192.170.000,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.032.766.000,00 (*Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.965.695.000,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.094.672.000,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.782.797.159,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 47.782.797.159,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu*

Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 204.776.984.720,00 (*Dua Ratus Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) guru PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.918.619.640,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 523.414.080,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Delapan Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 182.560.146.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.620.000.000,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

- (6) Belanja Pelayanan Jasa Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.413.845.000,00 (*Empat Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.740.960.000,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.992.518.000,00 (*Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja Uang paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja TunjanganAlat kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPH kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;

n. Belanja Uang jasa Pengabdian DPRD;

- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 792.000.000,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 85.250.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 115.500.000,00 (*Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 79.200.000,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.155.000.000,00 (*Satu Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 58.095.000,00 (*Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.615.000.000,00 (*Enam Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.984.500.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPH kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.570.666,00 (*Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (12) Belanja pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 28.573,00 (*Dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 6.145.564.281,00 (*Enam Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 3.948.300.000,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (15) Belanja Uang jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 5.509.480,00 (*Lima Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 682.649.065,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh /Tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;

- k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.600.000,00 (*Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.644.000 (*Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.280.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
 - (5) Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.400.000,00 (*Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh /Tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 798.000,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.000,00 (*Sepuluh Ribu Rupiah*).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.580.000,00 (*Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 154.000,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 434.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - (11) Belanja insentif KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 481.462.192,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).

- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 24.286.873,00 (*Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 993.120.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 393.120.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 72.486.109.206,00 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Pegawai BLUD
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 72.486.109.206,00 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 513.502.386.683,00 (*Lima Ratus Tiga Belas Milyar Lima Ratus Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang Dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 88.670.827.597,00 (*Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 144.081.507.469,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Milyar Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.389.167.342,00 (*Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 54.591.849.466,00 (*Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*);

- (6) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 33.911.929.857,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tuju Rupiah*);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 74.778.960.168,00 (*Tujuh Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah*);
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 99.078.144.784,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 88.670.827.597,00 (*Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 88.660.727.597,00 (*Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*);
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.100.000,00 (*Sepuluh Juta Seratus Ribu Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 144.081.507.469,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Milyar Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran jaminan / Asuransi;
 - c. Belanja sewa Tanah;
 - d. Belanja sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja jasa Konsultasi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.582.837.490,00 (*Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.558.870.078,00 (*Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah*);
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*);
- (5) Belanja sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.494.660.008,00 (*enam milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu delapan Rupiah*);

- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.514.625.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 171.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah*);
- (8) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.670.164.893,00 (*Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*);
- (9) Belanja Jasa Konsultansi non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.775.850.000,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 7.311.500.000,00 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.389.167.342,00 (*Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 928.000.000,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*);

- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.899.501.109,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Satu Ribu Seratus Sembilan Rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.276.748.138,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Delapann Rupiah);
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.233.293.095,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah);
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 51.625.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 54.591.849.466,00 (*Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.591.849.466,00 (*Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 33.911.929.857,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tuju Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.637.701.300,00 (*Empat Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.274.228.557,00 (*Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Barang Dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 74.778.960.168,00 (*Tujuh Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang dan Jasa BOS;
- (2) Belanja Barang Dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 74.778.960.168,00 (*Tujuh Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Barang Dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 99.078.144.784,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang Dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 99.078.144.784,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.498.083.516,00 (*Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bunga;
- (2) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.498.083.516,00 (*Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*),

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 57.497.853.500,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;

- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.710.000.000,00 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.135.321.500,00 (*Lima Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.652.532.000,00 (*Satu milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.990.000.000,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.135.321.500,00 (*Lima Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan lembaga Nirlaba Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.967.000.000,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.799.821.500,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Uang kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.368.500.000,00 (*Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.652.532.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik;

- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.652.532.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.487.950.000,00 (*Empat Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;

b. Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang lainnya)

- (2) Belanja bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 680.000.000,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.807.950.000,00 (*Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 680.000.000,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu;

- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 680.000.000,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.807.950.000,00 (*Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang lainnya);
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.807.950.000,00 (*Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp. 443.422.828.134,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 120.359.900,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.345.176.010,00 (*Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sepuluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 74.601.364.024,00 (*Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 304.659.593.225,00 (*Tiga Ratus Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.568.741.202,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 127.593.773,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 120.359.900,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah BLUD;
- (2) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 120.359.900,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.345.176.010,00 (*Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sepuluh Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian;
 - l. Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi;
 - m. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BOS;
 - p. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.337.117.600,00, (*Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.256.774.000,00

(Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 115.904.762,00 *(Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);*
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 64.768.000,00 *(Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);*
- (6) Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.232.493.906,00 *(Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah);*
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 480.113.440,00 *(Empat Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah);*
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.041.023.364,00 *(Sembilan Milyar Empat Puluh Satu Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);*
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.888.356.431,00 *(Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);*
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 16.249.531.240,00 *(Enam Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).*
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 10.320.200,00 *(Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah).*
- (12) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 23.000.000,00 *(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah).*
- (13) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.820.000,00 *(Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).*

- (14) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 70.378.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 125.500.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (16) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 8.488.918.530,00 (*Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah*);
- (17) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 14.958.156.537,00 (*Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.337.117.600,00, (*Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Bantu;
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.037.874.400,00 (*Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.299.243.200,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.256.774.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.256.774.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 115.904.762,00 (*Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel tak bermesin;
 - c. Belanja modal alat ukur;
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.638.600,00 (*Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.338.462,00 (*Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.927.700,00 (*Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 64.768.000,00 (*Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pengolahan;
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.768.000,00 (*Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.232.493.906,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 361.177.840,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga *sebagaimana* dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.675.663.066,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 195.653.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 480.113.440,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 409.469.800,00 (*Empat Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.643.640,00 (*Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*);

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.041.023.364,00 (*Sembilan Milyar Empat Puluh Satu Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.591.169.964,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum *sebagaimana* dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.449.853.400,00 (*tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus Rupiah*).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.888.356.431,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek sekolah;
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.854.794.931,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.533.000,00 (*Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 16.249.531.240,00 (*Enam Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.315.973.442,00 (*Lima Belas Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 933.557.798,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 10.320.200,00 (*Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika;
- (2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.320.200,00 (*Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 23.000.000,00 (*Dua Puluh Tiga Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Sumur;
- (2) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.000.000,00 (*Dua Puluh Tiga Juta Rupiah*).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.820.000,00 (*Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;

- (2) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.820.000,00 (*Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 70.378.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pelindung;
 - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.500.000,00 (*Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.878.000,00 (*Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 125.500.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu lintas Darat;
- (2) Belanja Modal Rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 125.500.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 8.488.918.530,00 (*Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.488.918.530,00 (*Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 14.958.156.537,00 (*Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.958.156.537,00 (*Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 74.601.364.024,00 (*Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.925.891.024,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.675.473.000,00 (*Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.925.891.024,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.925.891.024,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.675.473.000,00 (*Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.675.473.000,00 (*Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 304.659.593.225,00 (*Tiga Ratus Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - Belanja Modal Bangunan Air;
 - Belanja Modal Instalasi;
 - Belanja Modal Jaringan;
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 244.730.120.896,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.361.766.329,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.410.456.000,00 (*Enam Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.920.250.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 237.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 244.730.120.896,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 243.430.120.896,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.361.766.329,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor;

- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.007.914.545,00 (*Lima Milyar Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.353.851.784,00 (*Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.410.456.000,00 (*Enam Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal instalasi Air Bersih/air Baku;
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.057.056.000,00 (*Enam Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 335.000.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.920.250.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya;
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.920.250.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 237.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD;
- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 237.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.568.741.202,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Tanaman;
 - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 134.500.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 393.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah*).

- (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 180.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 394.899.900,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.096.341.302,00 (*Dua Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 370.000.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 134.500.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan tercetak;
 - b. Belanja Modal Barang Perpustakaan Terekam dan bentuk Mikro;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Perpustakaan Terekam dan bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 119.500.000,00 (*Seratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 393.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Barang bercorak Kesenian;
 - b. Belanja Modal Barang Alat Bercorak Kebudayaan;
- (2) Belanja Modal Barang bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 383.000.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 180.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 180.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah*).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 394.899.900,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:

b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;

- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 394.899.900,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.096.341.302,00 (*Dua Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;

- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.096.341.302,00 (*Dua Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah*).

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 370.000.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD;

- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 370.000.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 127.593.773,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD;
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 127.593.773,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d direncanakan sebesar Rp. 490.422.576.825,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.095.956.325,00 (*Sebelas Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 479.326.620.500,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.095.956.325,00 (*Sebelas Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa;
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.357.580.173,00 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.738.376.152,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.357.580.173,00 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.357.580.173,00 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp. 1.738.376.152,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi hasil Retribuasi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
- (2) Belanja Bagi hasil Retribuasi daerah Kabaupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.738.376.152,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 98

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 479.326.620.500,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu*

Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 479.326.620.500,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 99

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 479.326.620.500,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 437.201.777.200,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.124.843.300,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 100

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 219.866.020.716,00 (*Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 101

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a direncanakan sebesar Rp. 229.665.842.494,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan pinjaman daerah;
 - c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 74.365.842.494,00 (*Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 155.000.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Milyar Rupiah*).
- (4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 102

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 74.365.842.494,00 (*Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Penghematan Belanja;
 - d. Sisa Belanja Lainnya;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.756.583.516,00 (*Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*);
- (3) Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.564.094.603,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*);
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.760.727.175,00 (*Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*);
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.284.437.200,00 (*Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*);

Pasal 103

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.756.583.516,00 (*Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
 - b. Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah
 - c. Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-Lain PAD yang Sah
- (2) Pelampauan penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.006.583.516,00 (*Enam Milyar Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*);
 - (3) Pelampauan penerimaan PAD-Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
 - (4) Pelampauan penerimaan PAD-Lain-Lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

Pasal 104

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.564.094.603,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Antar Daerah.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.949.164.603,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*);
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.614.930.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*);

Pasal 105

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.760.727.175,00 (*Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal;
 - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak terduga;
 - d. Sisa Belanja Transfer.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.358.507.000,00 (*Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah*);
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.950.000.000,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.952.220.175,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Sisa Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 106

- (1) Anggaran Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.284.437.200,00 (*Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.284.437.200,00 (*Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 107

- (1) Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 155.000.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;
- (2) Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 155.000.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 108

- (1) Anggaran Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 155.000.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Milyar Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah;
- (2) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 155.000.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 109

- (1) Anggaran Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat;
- (2) Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 110

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.799.821.778,00 (*Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
- (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.799.821.778,00 (*Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 111

- (1) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.799.821.778,00 (*Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) – BUMN – Jangka Menengah;

- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) – BUMN – Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.799.821.778,00 (*Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*);

Pasal 112

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 113

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 114

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 115

Peraturan Bupati Ponorogo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 30 DEC 2021

BUPATI PONOROGO,

H. SUGIRT SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 30-12-2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 No 134